

SKRIPSI

POLITIK NAHDLATUL ULAMA: (STUDI TENTANG PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA MAKASSAR TERHADAP PEMIMPIN NON-MUSLIM DI MAKASSAR)



Diajukan Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

PRATAMI VALENTINE F

E 111 15 313

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



HALAMAN JUDUL

**POLITIK NAHDLATUL ULAMA:
(STUDI TENTANG PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA
KOTA MAKASSAR TERHADAP PEMIMPIN NON-MUSLIM DI MAKASSAR)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

PRATAMI VALENTINE F

E 111 15 313

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
POLITIK NAHDLATUL ULAMA:
(STUDI TENTANG PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA
KOTA MAKASSAR TERHADAP PEMIMPIN NON-MUSLIM DI
MAKASSAR)

Di susun dan diajukan oleh :

PRATAMI VALENTINE F

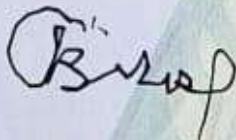
E 111 15 313

Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Basir, M. Ag.

NIP. 195812311988031006

Pembimbing II



Dr. Ariana Yunus, S.IP, M. Si.

NIP. 197107051998032002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.

NIP. 196212311990031023



LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
POLITIK NAHDLATUL ULAMA:
(STUDI TENTANG PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA
KOTA MAKASSAR TERHADAP PEMIMPIN NON-MUSLIM DI
MAKASSAR)

Di susun dan diajukan oleh :

PRATAMI VALENTINE F

E 111 15 313

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. BasirSyam, M. Ag.

Sekretaris : Dr. ArianaYunus, S. IP, M. Si.

Anggota : Drs. A. Yakub, M. Si, Ph.D.

Anggota : Haryanto, S. IP, MA.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRATAMI VALENTINE F

NIM : E11115313

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Politik Nahdlatul Ulama : (Studi Tentang Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar Terhadap Pemimpin Non Muslim Di Makassar)"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Agustus 2020



(PRATAMI VALENTINE F))



ABSTRAK

PRATAMI VALENTINE F, E11115313. Skripsi yang berjudul “Politik Nahdlatul Ulama: (Studi Tentang Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar Terhadap Pemimpin Non-Muslim Di Makassar)” yang disusun oleh Pratami Valentine F (E11115313) dibawah bimbingan bapak Prof. Dr. M. Basir, M. Ag. Selaku pembimbing I dan ibu Dr. Ariana Yunus, S. IP, M. Si. selaku pembimbing II.

Dinamika mengenai pemimpin non-muslim di Indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat hingga sekarang. Terlebih lagi ketika terjadi pemilihan kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Sejumlah ormas Islam mengeluarkan pandangan tentang perkara ini, salah satunya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki sikap tersendiri dalam menyikapi kehadiran pemimpin non-muslim, khususnya di lingkup pengurus NU di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar terhadap pemimpin non-muslim. Untuk mencapai penelitian tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar mengenai pemimpin non-muslim tetap mengutamakan pemimpin dari kalangan muslim, tapi tidak menutup kemungkinan dapat memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Untuk badan otonom Nahdlatul Ulama itu sendiri memiliki pandangan yang berbeda, mereka lebih melihat latar belakang dari para calon atau pihak terkait, dan tidak hanya perihal agama.

Kata Kunci: Kota Makassar, Nahdlatul Ulama, Pemimpin Non-Muslim, Pengurus



ABSTRACT

PRATAMI VALENTINE F, E11115313. The thesis entitled "Politics of Nahdlatul Ulama: (A Study of the Views of the Management of the Nahdlatul Ulama at City of Makassar towards non-Muslim leaders in Makassar)" was compiled by Pratami Valentine F (E11115313) under the guidance of Prof. Dr. M. Basir, M. Ag. As supervisor I and Mrs. Dr. Ariana Yunus, S. IP, M. Si. as supervisor II.

The dynamics of non-Muslim leaders in Indonesia are still a hot topic of conversation today. Moreover, when there was a leadership election, both executive and legislative. A number of Islamic organizations expressed their views on this matter, one of which was Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama has its own attitude in addressing the presence of non-Muslim leaders, especially those within the NU board in Makassar City. This study aims to determine the views of the Makassar City Nahdlatul Ulama Management towards non-Muslim leaders. To achieve this research, the research method that the author uses is qualitative research with data collection techniques through interviews and literature study sourced from books, journals, documents, and websites. The results showed that the views of the Makassar City Nahdlatul Ulama management regarding non-Muslim leaders still prioritized Muslim leaders, but did not rule out the possibility of choosing leaders from non-Muslim circles. The autonomous body of Nahdlatul Ulama itself has a different view, they look more at the backgrounds of the candidates or related parties, and not just matters of religion.

Keywords: Committee, Makassar City, Nahdlatul Ulama, Non-Muslim Leader



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Politik Nahdlatul Ulama: (Studi Tentang Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar Terhadap Pemimpin Non-Muslim di Makassar) Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan oleh banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tidak hentinya penulis ingin bersyukur karena berkat pertolongan-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat sampai tahap ini.
2. Keluarga tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada Vivi. Terima kasih kepada Ayahanda Moch. Pramudya Paewangi, Ibunda Nita Ariani, dan Adik Dani, Shani, Kiki, Wali yang selalu mendoakan Vivi, karena berkat doanyalah penulis bisa sampai ke tahap ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, dan Kebaikan serta Keberkahan di dunia dan di akhirat kepada Ayahanda, Ibunda, dan Adik-Adik.



3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aristina Pulubuhu, beserta jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si, beserta jajarannya.
5. Struktural Jurusan dan Staf Akademika Ilmu Politik yang selalu sabar menghadapi keinginan mahasiswa(i), terima kasih atas bantuannya dan keikhlasannya mengurus kami para mahasiswa(i).
6. Seluruh Dosen Ilmu Politik. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dan telah sabar mengajar para mahasiswa(i).
7. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. M. Basir Syam selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Ariana Yunus, Si.P, M.Si selaku Pembimbing II. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya selama ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bimbingan. Terima kasih atas saran yang diberikan untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teman seperjuanganku Andi Ubaidillah MB yang telah menjadi teman sejati satu-satunya, menjadi partner dalam segala hal, menjadi musuh, menjadi sahabat, menjadi segala hal dalam waktu yang bersamaan. Terima kasih sudah selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan revisian dan selalu menyemangati penulis mengerjakan skripsi ini.



9. Terima kasih kepada para editor penulis yang selalu mengoreksi dan senantiasa membaca revisian skripsi penulis A. M. Fatwa A. Rahman Si.P, Ashari Kara Si. P , dan Indra Mardika Si. P .
10. Sahabat-Sahabatku (Rizka, Susi, Dina, Rini, Nisa, Alaya, Alikha, Della, Nurul) yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman DELEGASI 2015 yang telah memberi semangat satu sama lain dan selalu bertanya perkembangan skripsi penulis.
12. Teman-Teman KKN Gel. 99 Kab. Pangkep Kec. Pangkajene Kel. Jagong. Iccang, Rizka, Rasul, Rini, Budi, Arfah, dan Yuyun yang sudah menjadi penyemangat penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
13. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Akhir kata tiada hentinya penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Baik yang telah memberikan bantuan moril serta bantuan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap agar skripsi ini diterima dengan baik, serta membawa kebermanfaatan bagi kita



semua, tidak hanya untuk penulis, serta dapat menjadi bahan masukan atau sumber acuan bagi penelitian sejenis lainnya di kemudian hari.

Makassar, 20 Juli 2020

Penulis,

Pratami Valentine F



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pendekatan Institusionalisme Baru	10
B. Psikologi Politik.....	13
C. Identitas Sosial	16
D. Dimensi dalam Mengkonseptualisasikan Identitas Sosial.....	17
D.1 Persepsi dalam Konteks Antar Kelompok.....	17
D.2 <i>In-group</i> dan <i>Out-group</i>	18
E. Pengertian Pemimpin dalam Islam	22
F. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam.....	24
G. Pemimpin Muslim Menurut Para Tokoh	29
H. Rujukan Penelitian Terdahulu.....	33
I. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
Objek Penelitian.....	37
Waktu Pelaksanaan Penelitian	38



C. Tipe Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Berdiri Nahdlatul Ulama	42
B. Visi, Misi, Tujuan dan Lambang Nahdlatul Ulama.....	48
C. Sejarah Berdiri Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan	51
D. Sejarah Berdiri Nahdlatul Ulama di Kota Makassar	55
E. Badan Otonom Nahdlatul Ulama.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pemimpin Non-Muslim	60
B. Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar tentang Pemimpin Non-Muslim.....	67
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
Lampiran (Dokumentasi Wawancara):	81
Lampiran (Surat Penelitian)	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berpolitik, kehadiran pemimpin merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan. Pemimpin memiliki andil di lingkup lokal, negara, bahkan global. Kehadiran pemimpin tentu tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban yang senantiasa mengiringinya.

Agar kehidupan berjalan teratur dan hubungan sesama manusia berjalan rukun dan damai, maka diangkatlah pemimpin yang diberikan kewenangan untuk memimpin pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin merupakan sesuatu yang sakral. Bahkan jika ada tiga orang muslim melakukan perjalanan jauh, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan agar salah seorang mereka diangkat sebagai pemimpin.

Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia untuk kehidupan dunia. Lebih dari itu, ia merupakan *khalifah* yang berperan memimpin dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan perintah dan hukum Allah.



Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat didefinisikan secara luas sebagai proses mempengaruhi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran suatu kelompok atau orang, pengorganisasian dari aktivitas untuk mencari sasaran, pemeliharaan hubungan dan kerja sama, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok. Hal tersebut memberi penjelasan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, memotivasi, dan pengorganisasian suatu masalah¹.

Kepemimpinan menurut Islam merupakan berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan dalam Islam merupakan perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Seorang Pemimpin yang mementingkan diri sendiri, kelompok, keluarga, kedudukannya, dan hanya bertujuan kebendaan, penumpukan harta maka bukanlah kepemimpinan yang sebenarnya meskipun pemimpin tersebut beragama Islam. Di dalam Islam, pemimpin kadang disebut *Imām* atau *Khalāfah*.

Secara harfiah, *Imām* berasal dari kata *amma*, *ya'ummu* yang artinya menuju, menumpu, dan meneladani. Hal ini berarti seorang pemimpin harus selalu di depan memberi keteladanan atau kepeloporan



Mufti. 2015. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran, Cetakan I*. (Bandung: CV Pustaka) 43.

dalam segala bentuk kebaikan. Di samping itu, pemimpin disebut juga *Khalifah* yang berasal dari kata *Khalāfah* yang berarti dibelakang. *Khalifah* dinyatakan sebagai pengganti karna pengganti itu dibelakang atau datang setelah yang digantikan².

Situasi perpolitikan nasional saat ini sedang berkembang dinamis. Salah satu isu yang mulai muncul adalah kepemimpinan dari kalangan non-muslim. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dan memiliki berbagai macam pandangan mengenai kepemimpinan atau kepala negara non-muslim, termasuk kepala daerah atau petinggi politik lainnya. Boleh-tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan, baik di kalangan ulama maupun peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa.

Di satu sisi, sebagian ulama menganggap non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin karena ayat Al-Quran menyatakan demikian (Q.S Al-Ma'idah: 51). Di sisi lain, beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat



memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW³.

Polemik tentang boleh-tidaknya seorang non-muslim memimpin sebuah negara atau daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara yang lebih memilih menjadi negara “abu-abu” dari pada memilih secara tegas apakah ia negara agama atau negara sekuler, meskipun wacana negara agama masih perlu ditinjau ulang relevansinya karena setiap pilihan memiliki konsekuensi logis yang berbeda pula.

Hak-hak politik warga negara sangat ditentukan oleh bentuk negara. Sebuah negara Islam di mana konstitusi dan segala bentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada kitab suci tidak mungkin melanggengkan seorang pemimpin non-muslim. Sebab pemimpin negara harus orang yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai Islam, sehingga mustahil tugas tersebut diemban non-muslim. Sebaliknya, negara sekuler yang konstitusi dan peraturan perundang-undangnya tidak didasarkan pada ajaran agama tidak memberikan prasyarat agama tertentu bagi calon-calon pemimpin.

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul di Indonesia, baru-baru ini masyarakat Indonesia dipertemukan kembali dengan polemik pemimpin non-muslim. Permasalahan pemimpin, khususnya di

³ib Khalik. Pemimpin Non-Muslim dalam Persepektif Ibnu Taimiyah. *Studi KeIslaman*, No. 1, Juni 2014. Hlm. 60.

lingkup kepala daerah non-muslim muncul karena dipicu oleh kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok kemudian menimbulkan respon dari masyarakat Indonesia terutama dari kalangan ormas Islam dan para mahasiswa. Respon-respon inilah menimbulkan perdebatan antara tidak atau bolehnya kepala negara non-muslim di Indonesia⁴.

Ahok memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat DKI Jakarta. Selaku wakil gubernur, ia menjadi Gubernur dikarenakan Gubernur Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi), terpilih dan diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Jokowi terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan menjabat sejak 20 Oktober 2014. Sejak itu pula yang semulanya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Ahok.

Ketika hal ini terjadi, muncul pendapat yang berbeda-beda di lingkup masyarakat dalam pengangkatan pemimpin non-muslim. Banyaknya pendapat mengenai hal ini membuat masyarakat bingung akan suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh Gubernur Jakarta tersebut. Ada yang berpendapat bahwasannya diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang tidak seagama dan adapula yang berpendapat bahwa hal

diharamkan. Diskursus tentang pemimpin non-muslim memang

vita. Presiden Non Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim. *Islamica*. Volume 7, ember 2012. Hlm. 45.

hal yang termasuk fenomenal dalam Islam. Pembahasan tentang pemimpin non-muslim bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini. Ulama-ulama dan intelektual Muslim sudah jauh-jauh hari terlibat pembahasan boleh atau tidaknya umat Islam dipimpin oleh orang non-muslim. Meskipun diambil dari sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, tetap saja terjadi pro kontra.

Ini dapat terjadi karena pengaruh oleh perbedaan latar belakang keilmuan dan pemahaman mereka terhadap agama, serta kondisi sosial dan politik yang berkembang dalam dunia Islam. Para ulama yang ada dalam fikih klasik mengharamkan atau melarang pemimpin non-muslim terhadap umat Islam, mereka antara lain adalah, al-Jashhash, al-Alusi, Ibn Arabi, Kiya al-Harasi, Ibnu Katsir, al-Shabuni, al-Zamakhshari, Ali al-Sayis, Thabathabai, al-Qurthubi, Wahbah al-Zuhaili, al-Syaukani, at-Thabari, Sayyid Qutub, al-Mawardi, al-Juwaini, Abdul Wahab Khallaf, Hasan al-Banna, al-Maududi dan Taqiyuddin an-Nabhani⁵.

Terlepas dari pendapat yang menolak maupun membolehkan pemimpin non-muslim untuk orang muslim, penulis merasa perlu mengkaji persoalan yang tersebut. Terlebih lagi dengan melihat adanya penolakan-penolakan dari sebagian umat Islam, terhadap pemimpin non-muslim. Penolakan ini dilakukan dari hari-kehari, bahkan semakin masif menjelang



nu Syarif. 2006. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*. (Jakarta: Pustaka Sinar Ilm. 79.

Pilkada DKI Jakarta 2017. Aksi penolakan ini secara umum dilakukan melalui turun ke jalan, dan lain sebagainya.

Terjadinya penolakan terhadap gubernur non-muslim di DKI Jakarta tidak hanya dilakukan oleh individu. Penolakan terhadap pemimpin non-muslim ini dilakukan juga oleh ormas Islam yang menyatakan sikap haram memilih pemimpin non-muslim, sebut saja seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Dalam kedua ormas ini tidak ada perbedaan pendapat satu dengan yang lain terhadap pemahaman larangan memilih pemimpin non-muslim.

Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga rujukan umat, turut menyatakan sikap terhadap hal tersebut. Lembaga yang diisi oleh ulama-ulama berkompeten dalam hal ke-Islaman, mengeluarkan fatwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non-muslim. MUI menegaskan bahwa seorang muslim harus memilih pemimpin muslim⁶.

Pembahasan tentang pemimpin non-muslim ini sangat luas dan menuai berbagai macam pro dan kontra. Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran terkait rujukan Al-Quran maupun hadits tentang perkara ini. Dengan luasnya kajian terhadap perkara ini, penulis lebih terfokus untuk meneliti pemimpin dalam konteks politik/pemerintahan.



ka. 2019. *MUI Muslim Memilih Pemimpin Non Muslim*. Diakses melalui publika.co.id/berita/pemilu/hot-politik/14/03/21n2siql-mui-muslim-memilih-pemimpin-, pada tanggal 6 Oktober 2019.

Menarik untuk mencermati lebih lanjut perihal kehadiran pemimpin non-muslim, khususnya merujuk sejumlah tanggapan ormas terkait. Tidak hanya ormas yang telah disebutkan sebelumnya, tapi juga ormas lainnya, khususnya Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi yang telah hadir sejak lama, tentu Nahdlatul Ulama memiliki pandangannya tersendiri menghadapi fenomena tersebut, baik dalam lingkup keorganisasian maupun orang-perorangan di dalamnya.

Penulis merasa bahwa ini perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam. Khususnya untuk mengetahui pandangan Pengurus di lingkup Nahdlatul Ulama, terhadap persoalan pemimpin non-muslim, dan apa yang menjadi faktor bagi mereka yang membentuk pandangan tersebut. Pengurus yang dimaksud mencakup pengurus di lingkup Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, maupun pengurus di lingkup terkait NU Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada kondisi Kota Makassar dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, dan tidak sedikit yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. *Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap pemimpin non-muslim?*



2. Bagaimana pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar terhadap pemimpin non-muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Makassar terhadap pemimpin non-muslim”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat akademis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademisi. Khususnya Program Studi Ilmu Politik mengenai pemimpin non-muslim dalam pandangan Pengurus di lingkup Nahdlatul Ulama Kota Makassar.
- Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus informasi terkait pandangan Pengurus di lingkup Nahdlatul Ulama Kota Makassar terhadap pemimpin non-muslim.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme baru (*new institutionalism*) merupakan salah satu pendekatan yang berkembang dalam disiplin ilmu politik. Disebut institusionalisme baru, sebab merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme lama yang cenderung memandang lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis, dipandang lain oleh institusionalisme baru, yang menganggap institusi tersebut dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu (seperti membangun masyarakat yang lebih makmur).

Pendekatan ini dipicu oleh pendekatan perilaku (*behavioralis*) yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.

Merujuk Budiardjo (2014) menyebutkan bahwa Institusi ialah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang diterima sebagai standar. Lane dan Ersson, dalam Budiardjo menyebutkan bahwa institusi meliputi: (1) Struktur fisik, (2)



Struktur demografis, (3) Perkembangan historis, (4) Jaringan pribadi, dan (5) Struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Lebih lanjut, ada berbagai macam institusi seperti ada yang membuat peraturan, melaksanakan peraturan, memberi hukuman kepada pelanggar aturan. Parlemen, konstitusi, pemerintah, birokrasi, sistem partai, sistem peradilan, *civil society*, dan sebagainya disebut sebagai institusi politik.

Masih merujuk Lane dan Ersson, institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan: (a) siapa aktor yang sah; (b) jumlah aktor; dan (c) siapa menentukan tindakan. Selain itu, Goodin dalam Budiardjo (2014) merumuskan inti dari institusionalisme baru sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.



4. Hal ini disebabkan karena factor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai aktor historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Peters dalam Marsh dan Stoker (2011) membagi intitusionalisme baru ke dalam tujuh cabang. Tujuh cabang tersebut adalah sebagai berikut:

- *Institusionalisme normatif* mempelajari bagaimana norma dan nilai yang dikandung dalam institusi politik membentuk perilaku individu.
- *Institusionalisme pilihan rasional* menyatakan bahwa institusi politik adalah sistem aturan dan desakan yang di dalamnya individu berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka.
- *Institusionalisme historis* melihat pada bagaimana pilihan yang dibuat tentang desain institusional sistem pemerintahan mempengaruhi pembuatan keputusan individu di masa depan.
- *Institusionalisme empiris*, yang paling mirip dengan pendekatan

tradisional', mengelompokkan berbagai jenis institusional dan menganalisis dampak praktisnya terhadap kinerja pemerintah.



- *Institusionalisme internasional* menunjukkan bahwa perilaku negara disetir oleh desakan struktural (formal dan informal) atau kehidupan politik internasional.
- *Institusionalisme sosiologis* mempelajari cara institusi menciptakan makna bagi individu, memberikan batu-bata teoritis yang penting bagi institusionalisme normatif dalam ilmu politik.
- *Institusionalisme jaringan* menunjukkan bagaimana pola-pola interaksi yang diatur tapi seringkali informal antara individu dan kelompok bisa membentuk perilaku politik.

Selain itu, terdapat enam garis analisis yang menjadi pembeda dasar dengan institusionalisme lama/tradisional, yaitu: (i) Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan; (ii) Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal; (iii) Dari konsepsi statis tentang institusi menjadi posisi kritis terhadap nilai; (iv) Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai; (v) Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah; dan (vi) Dari independensi menjadi kemelekatan.

B. Psikologi Politik

Psikologi Politik telah muncul sebagai sebuah bidang penting dalam ilmu politik dan psikologi, yang memungkinkan kita menjelaskan banyak perilaku politik, baik perilaku politik ini tampaknya merupakan patologis seperti tindakan-tindakan yang digambarkan di atas



ataupun merupakan praktik pengambilan keputusan normal yang adakalanya optimal, namun pada waktu lainnya merupakan kegagalan-kegagalan. Para psikolog dan para ilmuwan politik telah tertarik untuk memperluas pengetahuan mereka tentang isu-isu dan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pengambilan keputusan mengenai kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh para elit, konflik konflik yang berkisar dari kekerasan etnik hingga peperangan dan genosida, terorisme, pikiran-pikiran para rasialis, dan perilaku yang lebih tenang seperti perilaku pemberian suara, diantara banyak masalah dan isu lainnya yang secara tradisional merupakan perhatian dalam ilmu politik.⁷

Masih merujuk sumber yang sama, salah satu tujuan psikologi politik adalah untuk menyusun dalil-dalil umum tentang perilaku yang dapat membantu menjelaskan dan memprediksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sejumlah situasi yang berbeda-beda. Pendekatan yang digunakan oleh para psikolog politik dalam memahami dan memprediksi perilaku adalah metode ilmiah. Terdapat empat langkah untuk memahami dan memprediksi perilaku, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- Langkah pertama menyangkut pengadaan observasi. Langkah ini memerlukan pengadaan observasi yang sistematis dan tidak sistematis

dap perilaku dan peristiwa. Dari observasi ini, seorang peneliti

Muluk. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. Edisi Kedua. (Jakarta: Rajawali Press). Hlm.



mulai menyusun “dugaan-dugaan” tentang faktor atau variabel, yang mungkin mempengaruhi perilaku yang sedang diobservasi.

- Langkah kedua menyangkut perumusan penjelasan-penjelasan tentatif, atau suatu hipotesis. Pada tahap ini, seorang peneliti membuat prediksi tentang karakteristik hubungan di antara variabel-variabel.
- Langkah ketiga menyangkut pengadaan observasi dan eksperimen lanjutan. Pada tahap metode ilmiah ini, observasi diadakan untuk menguji validitas hipotesis tersebut.
- Pada langkah keempat, penghalusan dan pengujian kembali penjelasan-penjelasan, para peneliti merumuskan kembali hipotesis mereka atas dasar observasi yang dijalankan pada langkah ketiga. Tahap ini mungkin menyangkut eksplorasi batas-batas suatu fenomena, eksplorasi penyebab dari hubungan-hubungan, atau perluasan atas hubungan-hubungan yang ditemukan.

Terkait hubungan antara psikologi dan politik, psikologi memberikan manfaat bagi ilmu politik, karena para ilmuwan politik menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami perilaku politik. Namun, ilmu politik juga memberikan manfaat bagi psikologi, karena pengujian terhadap teori-teori psikologi dalam situasi politik dapat membantu para psikolog memperhalus teori-teori mereka. Seiring waktu dan sejalan dengan berkembangnya pemahaman psikolog politik mulai membahas



karakteristik pribadi seperti motivasi dan sifat-sifat pada analisis-analisis mereka tentang para pemimpin politik.⁸

C. Identitas Sosial

Teori identitas sosial dipelopori oleh Henri Tajfel pada tahun 1957 dalam upaya menjelaskan prasangka, diskriminasi, perubahan sosial dan konflik antar kelompok. Menurut Tajfel, *social identity* adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu.

Hogg dan Abram (1990) menjelaskan identitas sosial sebagai rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. Menurut William James (dalam Walgito, 2002), *social identity* lebih diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, dimana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisiknya sendiri saja, melainkan juga tentang anak-istrinya, rumahnya,



1. 9.

pekerjaannya, nenek moyangnya, teman–temannya, miliknya, uangnya dan lain–lain.

Pada umumnya, individu-individu membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda yakni kita dan mereka. Kita adalah *in group*, sedangkan mereka adalah *out group*. Berdasarkan uraian beberapa tokoh mengenai pengertian identitas sosial, maka dapat disimpulkan bahwa identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu, yang di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut.

D. Dimensi dalam Mengkonseptualisasikan Identitas Sosial

Menurut Jackson and Smith (dalam Barron and Donn, 1991) ada empat dimensi dalam mengkonseptualisasikan identitas sosial, yaitu:

D.1 Persepsi dalam Konteks Antar Kelompok

Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu didalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian,

terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain.



D.2 *In-group* dan *Out-group*

Sejajar dengan pembentukan struktur kelompok, timbul pula sikap perasaan antara anggotanya yang disebut sikap perasaan *in-group* berkaitan dengan seluk beluk usaha dan orang-orang yang dipahami dan dialami oleh anggota pada interaksi didalam kelompoknya. Sedangkan *out-group* adalah semua usaha dan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam *in-group* tadi. Sikap perasaan terhadap anggota *in-group* adalah sikap perasaan terhadap “orang dalam”. Sedangkan sikap perasaan *out-group* adalah sikap perasaan terhadap semua orang yang termasuk “orang luar” (Gerungan, 2010, Hlm: 101).

In-group adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya. *Out-group* adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan *in-group* nya. Perasaan *in-group* atau *out-group* didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainya (Soekanto, 1982). Contoh sikap perasaan *in-group* misalnya, sekelompok kecil orang yang dalam peperangan telah menjalankan tugas yang sulit dan telah mengalami pahit getir bersama-sama mempunyai cara-cara senda atau yang khusus dan ditujukan kepada kawan-kawan sejawatnya. Apabila mereka sedang bersenda gurau, lalu ada orang lain



yang turut tertawa dengan mereka. Maka kawan-kawan ini dengan tiba-tiba diam dan tidak berkata apa-apa, lalu pergi dari tempat itu karena muncul seorang *out-group* yang ingin turut serta dengan mereka (Bill Maulidi).

Sikap perasaan *in-group* itu seakan-akan hanyalah mengizinkan kawan-kawan anggota *in-group* itu untuk turut serta dengan kegiatan yang mereka lakukan. *Out-group* tidak diperkenankan turut serta. Seakan-akan orang luar harus membuktikan terlebih dahulu bahwa mereka mau solider dengan *in-group*, mau berkorban bersama dengan sekawan *in-group* demi kemajuan bersama. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mau dan dapat memikul pahit getirnya bersama barulah mereka boleh ikut serta dengan kegiatan *out-group* itu. Dalam proses sosialisasi (*socialization*) orang mendapatkan pengetahuan antara “kami”-nya dengan “mereka”-nya. Kepentingan suatu kelompok sosial serta sikap-sikap yang mendukungnya terwujud dalam perbedaan kelompok-kelompok sosial tersebut yang dibuat oleh individu mengidentifikasikan dirinya sebagai *in-group* nya (W.G Sumner). Jelas bahwa apabila suatu kelompok sosial merupakan “in-group” atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi-situasi sosial yang tertentu. *Out-group* diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan *in-group*-nya. Ia sering dikaitkan dengan istilah-istilah “kami atau kita” dan “mereka”, seperti “kita warga RT 001”



sedangkan “mereka warga RT 002”, “kami mahasiswa fakultas hukum”, sedangkan “mereka mahasiswa fakultas ekonomi”, “kami pegawai negeri” dan “mereka pedagang”. Sikap-sikap *in-group* pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok.

Sikap *out-group* selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan *in-group* dan *out-group* atau perasaan dalam serta luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme (Polak, 1966). Anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu sedikit banyak akan mempunyai kecenderungan untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya.

Kecenderungan tadi disebut etnosentrisme, yaitu suatu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Sikap etnosentris tadi sering disamakan dengan sikap memercayai sesuatu sehingga kadang-kadang sukar sekali bagi yang bersangkutan untuk mengubahnya. Walaupun dia menyadaribahwa sikapnya salah. Sikap etnosentris

osialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, dar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan ng lain. Di dalam proses tersebut sering kali digunakan stereotip,



yakni gambaran atau anggapan-anggapan yang bersifat mengejek terhadap suatu objek tertentu. Keadaan demikian sering kali dijumpai dalam sikap suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainya misalnya golongan orang-orang berkulit putih terhadap orang-orang negro di Amerika Serikat. Sikap demikian mempunyai aneka macam dasar yang saling berhubungan atau bahkan kadang-kadang berlawanan satu dengan yang lainnya. Misalnya seseorang yang tergolong kedalam suatu kelompok etnis tertentu sikapnya mungkin berbeda dengan sikap kelompoknya sendiri karena dia memeluk agama lain atau mungkin pula daerah kelahiran berbeda.

In-group dan *out-group* dapat dijumpai di semua masyarakat, walaupun kepentingan-kepentinganya tidak selalu sama. Dalam masyarakat-masyarakat yang bersahaja mungkin jumlahnya tidak begitu banyak apabila dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang sederhana tadi perbedaan-perbedaannya tak begitu tampak dengan jelas. Atas pertimbangan tersebut dapatlah dikatakan bahwa setiap kelompok sosial, merupakan *in-group* bagi anggotanya. Konsep tersebut dapat diterapkan, baik terhadap kelompok-kelompok sosial yang relatif kecil sampai yang terbesar selama para anggotanya mengadakan identifikasi dengan kelompoknya.



E. Pengertian Pemimpin dalam Islam

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan. Di antara lain, pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai berburu, cakap dan pemberani berperang)⁹.

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Maka pembahasan tentang masalah kepemimpinan sudah banyak dibahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin mulai dari zaman Nabi hingga saat ini¹⁰.

Istilah kepemimpinan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna orang yang memimpin¹¹. Sedangkan kepemimpinan ditinjau dari segi bahasa, berasal dari *leadership* (kepemimpinan) yang berasal dari kata *leader* (pemimpin).

Kata ini muncul sekitar tahun 1300-an. Sedangkan kata *leadership* muncul



⁹Surwanto dkk. 1984. *Administrasi Pendidikan*. (Jakarta: Mutiara). Hlm. 38.
¹⁰Indonesia. 1948. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm.7.
¹¹Men Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Hlm. 967.

kemudian sekitar tahun 1700-an. Hingga pada tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin¹².

Kepemimpinan dalam Islam merupakan usaha menyeru manusia kepada *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari keimanan dan amal shaleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan kepentingan dirinya, kelompok, keluarga, kedudukan, dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun pemimpin tersebut beragama Islam dan berlabelkan Islam¹³.

Jadi di dalam Islam pemimpin kadang-kadang disebut imam, terkadang disebut khalifah. Secara harfiah, imam berasal dari kata *amma*, *ya'ummu* yang artinya menuju, menumpu, dan meneladani. Ini berarti seorang imam atau pemimpin harus selalu didepan guna memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin disebut juga dengan *khalifah* yang berasal dari kata *khalafa* yang berarti di belakang, karenanya *khalifah* dinyatakan sebagai



Rivai. 2003. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. (Jakarta: Raja Grafindo). Hlm. 8.
mah. *Manajemen Kepemimpinan Islam*. (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung). Hlm.

pengganti, karena memegang pengganti itu di belakang atau datang sesudah yang digantikan.

F. Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam

Sebelum lebih jauh membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pemimpin dalam perspektif Islam, penulis ingin menjelaskan secara singkat tentang istilah pemimpin yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, kata pemimpin dalam Al-Qur'an terdapat dalam enam macam, yaitu *khalifah, amir, ulul amr, imam, sultan, mulk*, dan *awliya*.¹⁴ Semua kata tersebut memiliki makna yang perbedaan dari segi penafsiran atau penjelasan. Oleh karena itu, penulis hanya fokus kepada pembahasan kepemimpinan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ditemukan sebelas (11) syarat pemimpin dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Mujar Ibnu Syarif.¹⁵ Namun dalam tulisan ini penulis hanya menjelaskan enam syarat yang paling dominan atau yang utama. Keenam syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: *Pertama*, harus beragama Islam. Syarat ini antara lain ditemukan dalam ayat 59 surat al-Nisa yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: ٩٥)



¹⁴ Nad Abd al-Jawwad. 2009. *Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah*, terjemahan oleh. an Jufri (Solo: Pustaka Iltizam). Hlm. 10.
¹⁵ nu Syarif. *Op.Cit*. Hlm. 33.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) dari kalanganmu sendiri” (Q.S. al-Nisa : 59)

Syarat pemimpin harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata “minkum” (مِنْكُمْ) yang termaktub pada akhir ayat di atas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi “minkum ayyuhalmuslimun”, yang berarti dari kalanganmu sendiri wahai orang-orang Muslim. Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi oleh seorang pemimpin Islam, mengingat salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syariat Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada non-muslim, yang tidak percaya kepada syariat Islam.¹⁶ Maka secara otomatis penerapan syariat Islam akan sangat sulit untuk terealisasi serta semua kepentingan-kepentingan umat Islam akan sangat sulit untuk diwujudkan. Justru kepentingan-kepentingan dari kalangan mereka yang akan diutamakan.

Kedua, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan dalam surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النِّسَاءُ: ٣٤)

Artinya: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita,...” (Q.S. al-Nisa: 34)

Ketiga, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam surat

ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. 34.



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(النِّسَاءُ: ٥)

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,... (Q.S. al-Nisa : 5)

Ayat diatas memberikan alasan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada dibawah pengampuannya untuk dikelolanya sendirisebelum ia dewasa.¹⁷ Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri hartanya. Maka dari itu bila mengelola hartanya sendiri seorang yang belum dewasa dilarang, maka tentu ia lebih tidak diperbolehkan lagi untuk mengatur atau memimpin pemerintahan yang jauh lebih sulit dibanding mengatur dan mengelola sendiri harta kekayaannya.

Keempat, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam surat Shadayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ (ص: ٢٦)

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (pewaris) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara



1. 36.

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (Q.S. Shad: 26)

Makna kata adil sebagaimana yang dijelaskan diatas, lazim juga digunakan sebagai makna kata taqwa dan wara, sehingga pemimpin yang adil dapat jugadisebut pemimpin yang bertaqwa dan wara, atau bisa juga disebut pemimpin yang berakhlak mulia. Sedangkan lawan kata adil adalah zalim, yang berarti seseorang yang selalu berlaku buruk, suka menindas, senang berbuat aniaya, atau bertindak sewenang-wenang.¹⁸

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (يسف: ٥٥)

Artinya: *"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf : 55)*

Pemimpin yang pandai menjaga amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan seorang pemimpin yang profesional adalah seorang pemimpin yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankantugasnya sebagai seorang pemimpin.¹⁹



1. 39.
1. 40.

Dalam Surat Yusuf ayat 55 diatas seorang pemimpin yang pandai menjaga amanah dan profesional itu disebut dengan istilah “*hafizhun‘alim*”. Istilah ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yang ketika memimpin di Negeri Mesir, ternyata benar-benar terbukti tampil sebagai pemimpin yang pandai menjaga amanah dan profesional, sehingga Negeri Mesir menuju puncak kemakmuran keadilan dan kesejahteraan.

Keenam, harus kuat atau harus sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur’an surat al-Qashash ayat 26 dan surat al-Baqarah ayat 247, yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (قصص: ٢٦)

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S. al-Qashash : 26)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (قصص: ٢٧)

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa” (Q.S. al-Baqarah : 247)



arat kekuatan atau kesehatan fisik antara lain, dapat
omodasi pengertian, harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak

cacat fisik, semisal tidakbuntung tangan ataupun kakinya, tidak buta, tuli, bisu, lumpuh, dan gangguan kesehatan yang bisa menjadi kendala baginya dalam bertugas. Sedangkan syarat keilmuan meliputi dua macam ilmu. Pertama, ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama, seperti ilmu Al-Qur'an, ilmu Hadits, ilmu Bahasa Arab, ilmu Fikih dan *Ushul Fikih* serta ilmu *Nasakh* dan *Mansukh*. Kedua, ilmu-ilmu umum, seperti ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi serta ilmu umum lainnya yang dipergunakan untuk kelancarannya dalam memimpin pemerintahan.

G. Pemimpin Muslim Menurut Para Tokoh

Khazanah pemikiran politik Islam itu luar biasa. Para ulama klasik telah melahirkan pemikiran yang bernas dan cerdas pada masanya. Terdapat sejumlah tokoh yang memberikan rujukan terkait syarat pemimpin dalam pandangan agama Islam. Tokoh tersebut adalah al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Lebih lanjut terkait pemikiran para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

- **Al-Mawardi (972-1058)**

Beliau merupakan ulama mahsyur pada masanya. Sangat dekat dengan dua *Khalifah*, yaitu al-Qadir dan al-Qaim bi Amrillah (khalifah ke-25 dan ke-26 Abbasiyah di Baghdad). Imam al-Mawardi pernah diangkat menjadi duta besar, bahkan menjadi Ketua Mahkamah Agung. Pada masa

, Imam al-Mawardi menulis kitabnya yang terkenal *al-Ahkam al-
yah*.



Imam al-Mawardi memberikan tujuh syarat untuk menjadi *Khalifah*:

1. Rasa keadilan (*'adalah*);
2. Pengetahuan (*'ilm*);
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
5. Berwawasan luas dalam hal administrasi negara
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah Islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy

- **Al- Ghazali (1058 – 1111)**

Pada saat wafatnya Imam al-Mawardi tahun 1058, pada tahun yang sama telah lahir mutiara ilmu lainnya. Dialah Imam al-Ghazali. Kitab *Ihya* yang ditulis beliau pada masa tuanya sangat dikenal dan dipelajari oleh para santri. Namun sebelum ia memasuki dunia tasawuf, al-Ghazali adalah seorang professor yang menguasai berbagai bidang berbeda, seperti filsafat dan *ushul al-fiqh*.

Al-Ghazali sangat dihormati oleh dua Khalifah, yaitu al-Muqtadi dan al-Mustazhir Billah (Khalifah Abbasiyah ke -27 dan ke-28 di Baghdad). Seperti juga al-Mawardi, Imam al-Ghazali pernah menjadi duta besar dan pandangan serta fatwanya sangat berpengaruh pada kedua khalifah di

a masing-masing. Dilaporkan itulah masa keemasan al-Ghazali yang sangat kaya raya dengan berbagai fasilitas kenegaraan.



Pada masa Khalifah al-Mustazhir, muncul perlawanan dari Kaum Batiniyah (salah satu sekte syi'ah). al-Ghazali menulis buku yang berisi polemik dengan sekte Batiniyah tersebut. Nama kitabnya *Fada'ih al-Batiniyyah wa Fada'il al-Mustazhiriyyah* (dikenal kemudian dengan kitab *Mustahziri*). Salah satu bab yang ditulis Imam al-Ghazali adalah argumentasi beliau bahwa Khalifah al-Mustahzir, yang diangkat menggantikan ayahnya saat berusia 16 tahun, adalah khalifah yang sah dan memenuhi semua persyaratan. Pada point ini Imam al-Ghazali menuliskan 10 persyaratan menjadi Khalifah:

1. *Baligh*
2. Berakal (tidak gila)
3. Merdeka (bukan budak)
4. Lelaki
5. Keturunan suku Quraisy
6. Sehat panca indera
7. Keberanian untuk perang
8. Punya kompetensi (*kifayah*)
9. Punya pengetahuan
10. *Wara'*

- **Ibn Khaldun (1332 – 1406).**

Dua ratus kemudian kondisi umat sudah berbeda, dan penguasa Muslim sudah terpecah-pecah ke dalam beberapa kesultanan kecil. Ibn

lahir pada masa kepemimpinan Hafsiyyun (Hafsid Dinasti) di



Tunisia. Ini adalah pecahan dari Kekhalifahan al-Muwahiddun (Almohad *Empire*).

Dalam al-Muqaddimah, kitabnya yang terkenal itu, Ibn Khaldun menuliskan 5 syarat untuk menjadi *khalifah*:

1. Berilmu
2. Adil
3. Kompetensi
4. Sehat panca indera
5. Memiliki sifat suku Quraisy

Kita perhatikan dari ketiga ulama klasik itu, semuanya menuliskan syarat pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Ini berasal dari hadis “*al-aimmah min Qurasy*” (kepemimpinan itu dari suku Quraisy). Berbeda dengan al-Mawardi dan al-Ghazali, Ibn Khaldun tidak memahami teks hadis ini secara lahiriah belaka. Ia memahami bahwa yang ditekankan adalah sifat dan kemampuan suku Quraisy yang pada masa Nabi di atas suku lain. Suku Quraisy merupakan suku Arab paling terkemuka dengan solidaritas yang kuat dan dominan serta berwibawa. Jadi teks itu haruslah dibaca: Kepemimpinan itu berada pada mereka yang memiliki ciri-ciri suku Quraisy dan tidak musti harus selalu orang Quraisy.

Ibn Khaldun melakukan re-interpretasi terhadap Hadis tersebut kondisi satu hal: sudah semakin sulit mencari orang dari suku pada masa Ibn Khaldun hidup di abad ke-14 masehi dimana Islam tersebar ke penjuru dunia. Kalaupun ketemu orang dari suku



Quraisy belum tentu dia memenuhi persyaratan lainnya. Walhasil perubahan kondisi membuat Ibn Khaldun menafsirkan ulang persyaratan *Khalifah* yang ada.

H. Rujukan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa literatur/penelitian yang menjadi rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Hal ini juga yang memudahkan penulis dalam mencari rujukan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi, didasarkan pada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, penulis menyajikannya sebagai berikut:

1. Lulu Nadziroh. 2017. Pemimpin Non-muslim Menurut Ibnu Taimiyah dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di DKI Jakarta tahun 2017. Dipublikasikan sebagai Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami tentang pandangan Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin non-muslim. Dalam hal ini bagaimana pernyataan Ibnu Taimiyah di atas jikadisesuaikan dengan konteks DKI Jakarta saat ini, dan bagaimana jika konteksnya non-muslim tersebut dalam keadaan darurat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif analisis, dan

akanpendekatan normatif melalui teks dalam Al-Qur'an dan
t Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, lalu secara empiris dikaitkan
fenomena pemimpin non-muslim di DKI Jakarta.



Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti fenomena pemimpin non-muslim. Adapun perbedaannya penelitian tersebut meneliti berdasarkan sudut pandang Ibnu Taimiyah khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sementara penelitian oleh penulis terfokus pada sudut pandang ormas khususnya Pengurus di lingkup NU Kota Makassar.

2. Reza Surya Pranata. 2018. Memilih Pemimpin Non-muslim Dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandungan Kecamatan Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2015). Dipublikasikan sebagai Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui bagaimana cara pandang dan alasan masyarakat desa kandungan kecamatan pematang bandar tentang pemimpin non-muslim. Fenomena ini terjadi pada beberapa daerah di Indonesia dimana masyarakat yang beraga Islam malah memilih pemimpin yang beragama non-muslim. Tepatnya di salah satu desa yang masyarakat nya mayoritas muslim yaitu desa kandungan kecamatan pematang bandar Kabupaten Simalungun.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti fenomena pemimpin non-muslim. Adapun perbedaannya penelitian tersebut meneliti berdasarkan sudut pandang

kat yang berada di Desa Kandungan Kecamatan Pematang Kabupaten Simalungun pada tahun 2010-2015, sementara



penelitian oleh penulis terfokus pada sudut pandang ormas khususnya
Pengurus di lingkup NU Kota Makassar.



I. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

